



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Landasan Teoritis

Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan pada penelitian ini:

1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

a. Pengertian Pemangku Kepentingan

Terdapat dua pengertian mengenai pemangku kepentingan atau *stakeholder* menurut Freeman dan David (1983: 91). Dalam arti luas, pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi mampu memengaruhi pencapaian tujuan organisasi atau dipengaruhi oleh tujuan organisasi (Kelompok kepentingan publik, kelompok protes, lembaga pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat kerja, serta karyawan, segmen pelanggan, pemilik saham, dan lainnya adalah pemangku kepentingan dalam pengertian ini).

Sedangkan dalam arti sempit, pemangku kepentingan adalah setiap kelompok atau individu yang dapat diidentifikasi, dimana organisasi bergantung untuk kelangsungan hidupnya (Karyawan, segmen pelanggan, pemasok tertentu, lembaga pemerintahan utama, pemilik saham, lembaga keuangan tertentu, serta lainnya adalah semua pemangku kepentingan dalam pengertian ini).

Dalam *Global Reporting Initiative* atau GRI (2016: 8), pemangku kepentingan digambarkan sebagai individu ataupun entitas yang terpengaruh signifikan oleh kegiatan/ produk/ jasa yang dilakukan organisasi atau memengaruhi kemampuan organisasi menerapkan strateginya atau mencapai

tujuan. Yang dimaksud entitas atau individu di antaranya seperti karyawan/pekerja lainnya, investor atau pemegang saham, pemasok, kelompok retan, masyarakat, dan LSM/ organisasi masyarakat lainnya.

b. Sumber Kekuatan Pemangku Kepentingan

Dalam teori pemangku kepentingan menurut Freeman dan David (1983: 93), pada tingkat analitis, konsep pemangku kepentingan dianggap sebagai suatu pemikiran yang melebihi strategi dan masalah operasional umum. Perusahaan harus mampu memahami bagaimana hubungan antara organisasi dengan pemegang kepentingan akan mengubah penerapan kebijakan tertentu. Pemangku kepentingan dapat digambarkan sebagai dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah “kepentingan” yang berkisar dari kepentingan ekuitas hingga kepentingan ekonomi atau saham pasar hingga *influencer* atau pemberi pengaruh. Pemegang saham memiliki kepentingan ekuitas, sedangkan pelanggan dan pemasok memiliki kepentingan ekonomi.

Dimensi yang kedua adalah “kekuatan”, berkisar dari kekuatan formalistik atau hak suara pemegang saham, hingga kekuatan ekonomi pelanggan ataupun kekuatan politik. Yang dimaksud dengan kekuatan ekonomi adalah kemampuan untuk mempengaruhi berdasarkan keputusan pasar. Pelanggan, pemasok dan karyawan memiliki kekuatan ekonomi. Sedangkan kekuatan politik adalah kemampuan untuk memengaruhi proses politik. Pemerintah dan kelompok kepentingan khusus memiliki kekuatan politik. Pemegang saham dan dewan direksi memiliki kekuatan formal. Satu pemangku kepentingan dapat memiliki lebih dari satu jenis kepentingan atau kekuatan. Seorang pekerja dapat menjadi pemegang saham, pelanggan, bahkan pemberi pengaruh.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Secara teoritis, analisis pemangku kepentingan dilakukan untuk memperkaya pendekatan ekonomi terhadap strategi perusahaan, serta memasukkan pemberi pengaruh dalam proses strategi. Dalam strateginya, perusahaan memperhitungkan sejumlah kelompok dan menganalisis dampak strategisnya terhadap perusahaan.

c. Klasifikasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Menurut Manetti (2011) dalam Shams, et al (2018: 4), terdapat tiga fase dalam pertumbuhan bertahap keterlibatan pemangku kepentingan. Fase pertama, yaitu perusahaan mengidentifikasi pemangku kepentingan primer dan sekunder mereka, lalu di fase kedua, perusahaan mencoba untuk menanggapi ekspektasi dari pemangku kepentingan, dengan menyeimbangkan posisi terhadap masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi. Kemudian di fase terakhir, perusahaan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dengan berbagi ide serta informasi melalui komitmen bersama, dengan memandang hal tersebut sebagai tanggung jawab bersama untuk tindakan yang diambil. Fase inilah yang dinamakan sebagai keterlibatan pemangku kepentingan atau *stakeholder engagement* (SE), yang merupakan sebuah komponen penentu keberlanjutan manajemen perusahaan, yang mewakili cara melibatkan sebagian besar pihak-pihak secara positif dan strategis, serta menentukan penciptaan nilai dalam jangka waktu menengah hingga panjang dan orientasi strategis perusahaan.

Menurut GRI (2016: 8), pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan pengamatan media, terlibat bersama komunitas ilmiah, atau melakukan kegiatan dengan berkolaborasi dengan

rekan serta berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan yang menyeluruh ini cukup efektif, sehingga kebutuhan informasi pemangku kepentingan dipahami dengan benar. Dengan keterlibatan secara sistematis, organisasi juga dapat belajar dan semakin memiliki akuntabilitas, sehingga memperkuat kepercayaan antara organisasi dengan pemangku kepentingan, yang akhirnya dapat memperkuat kredibilitas laporan.

Dalam ilustrasi oleh Franklin (2018: 21), identifikasi pemangku kepentingan digambarkan sebagai lingkaran yang membentuk orbit mengelilingi organisasi, yang masing-masing mewakili pemberi pengaruh (*influencers*), penggugat (*claimants*), kolaborator (*collaborator*), dan/atau penerima (*recipient*) yang mengusulkan perbedaan hubungan yang dimiliki organisasi dengan berbagai *stakeholder*.

Gambar 2.1
Pendekatan *bulls-eye* untuk mengidentifikasi *stakeholder*



Sumber: Franklin, Aimee L. dalam Stakeholder Engagement (2020: 21)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan. Teori ini dalam literatur akuntansi sosial, memberikan wawasan yang mengenai tingkat perubahan perilaku pelaporan sosial dari suatu perusahaan atau organisasi.

Konsep legitimasi mengacu pada penerimaan yang disetujui oleh masyarakat. Hal ini berbeda dengan istilah legitimasi yang bergantung pada tindakan dari organisasi. Konsep ini tidak identik dengan kesuksesan ekonomi, namun lebih pada penegakan dan perubahan nilai sosial. Maka legitimasi dapat diartikan sebagai fungsi dari manajer organisasi yang tepat, berada di posisi tepat, dan melakukan hal yang tepat sebagaimana dirasakan oleh keyakinan individu, rekan dan masyarakat terkait. Konsep dari legitimasi organisasi digunakan untuk menyelidiki apakah strategi tertentu (seperti pelaporan kepatuhan sosial atau strategi audit) atau strategi keseluruhan (seperti strategi ekonomi kapitalis atau pemerintahan demokratis) mendapatkan atau mempertahankan penerimaan sosial.

b. Hubungan Teori Legitimasi dengan Harapan Sosial Masyarakat

Menurut Schuman dalam O'Donovan (2002: 350), manajemen dalam mempertahankan legitimasi perlu mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat seiring berjalannya waktu. Legitimasi merepresentasikan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan yang perlu dijaga. Ketika suatu perusahaan dianggap sebagai *good corporate citizen*, dengan bertindak secara bertanggungjawab atau memiliki sikap yang proaktif dalam menanggapi isu-isu sosial, masyarakat akan memiliki harapan terkait aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Legitimasi dan harapan sosial yang berubah terus menerus memiliki keterkaitan satu sama lain menurut Islam (2015: 29). Harapan sosial berubah terus menerus karena masyarakat terus mencari sebuah komunitas dimana setiap manusia berhak menikmati kehidupan yang layak, dan dapat memiliki kebebasan, keadilan, kesetaraan, lingkungan yang bebas polusi dan sebagainya. Karena perubahan harapan sosial tersebut, legitimasi yang dibutuhkan dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

3. Teori Manajemen yang Baik (*Good Management Theory*)

Menurut Waddock dan Graves (1997: 306), terdapat korelasi tinggi antara praktik manajemen yang baik dengan kinerja sosial perusahaan atau *corporate social performance* (CSP). Perhatian pada CSP, dapat meningkatkan hubungan dengan kelompok pemangku kepentingan utama, sehingga menghasilkan kinerja keseluruhan yang baik bagi perusahaan. Sebagai contoh, hubungan dengan pekerja yang baik (termasuk kesempatan kerja bagi perempuan dan minoritas) diharapkan dapat meningkatkan moral, produktivitas, dan kepuasan. Hubungan yang baik dengan masyarakat juga dapat memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk memberikan keringanan pajak yang meningkatkan persaingan, sekolah yang lebih baik, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang semakin baik dalam jangka panjang, ataupun pengurangan peraturan; sehingga dapat mengurangi biaya bagi perusahaan dan meningkatkan laba. Pandangan positif pelanggan terhadap kualitas produk perusahaan serta kesadaran lingkungan perusahaan dapat meningkatkan penjualan atau pengurangan biaya manajemen pemangku kepentingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

Ⓒ a. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Menurut *United Nations* (2009) dalam Shams, et al (2018: 14), tanggung jawab perusahaan adalah:

- (1) Suatu pendekatan untuk menyelidiki hubungan ketergantungan antara perusahaan dengan skema keuangan,
- (2) Suatu pendekatan untuk menyelidiki tingkat tanggung jawab sosial yang dimiliki oleh perusahaan terhadap komunitasnya,
- (3) Suatu pendekatan dalam pemikiran melalui peraturan dan pedoman politik, dan bagaimana tanggung jawab ini dapat terpenuhi, dan
- (4) Suatu metode untuk menciptakan manfaat bagi bisnis yang memenuhi tanggung jawab yang diidentifikasi.

Sedangkan *World Business Council for Sustainable Development* (WCED) dalam Kotler & Lee (2005: 3) memfokuskan pada pembangunan ekonomi, dan menggambarkan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, bekerja dengan pekerjanya, keluarga pekerja, komunitas, serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. Pergeseran Paradigma 1P (*Profit*) ke 3P (*Profit Planet People*) dalam Keberlanjutan (*Sustainability*)

Keberlanjutan menurut Hawkins (2006: 1) awalnya berarti ‘mampu ditanggung’, namun mulai berubah menjadi ‘mampu ditegakkan atau dipertahankan’. Kemudian, dalam Zink (2008: 5), diungkapkan bahwa WCED pertama kali menetapkan definisi dari pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*), yaitu setiap generasi harus mampu mendapatkan manfaat yang diwariskan generasi sebelumnya dan berkewajiban memegangnya dalam kepercayaan menyangkut kebutuhan generasi mendatang. Adapun tiga pilar pembangunan keberlanjutan terdiri dari tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus dipertimbangkan secara merata.

Gambar 2.2
3P Keberlanjutan

The three P's of sustainability are:

People	Planet	Profit
--------	--------	--------

Sumber: Shaffer, Gary dalam *Sustainability: What Does it Mean for You and for Your Library?* (2017: 232)

Konsep *Single bottom line* atau 1P (*Profit*) menurut Elkington (1998: 19) adalah figur laba yang digunakan sebagai figur pendapatan dalam pengungkapan *earnings per share* sebagai bagian dari praktik akuntansi standar. Dalam menilai hal ini, akuntan mengumpulkan, merekam, serta menganalisis data numerik dalam cakupan yang luas. Untuk menilai apakah suatu perusahaan memiliki operasi bisnis yang berkelanjutan secara ekonomis, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan modal ekonomi. Modal ekonomi adalah nilai total aset dikurangi dengan nilai kewajiban. Selanjutnya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



modal terdiri dari dua bentuk; modal fisik (mesin, pabrik) serta modal keuangan. Bentuk lainnya dapat berupa modal manusia, yang meliputi pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan lainnya yang memperkaya organisasi.

Audit dan pelaporan keberlanjutan menurut Elkington (1998: 22) membahas mengenai performa perusahaan dalam menjalankan *triple bottom line* atau 3P (*People, Planet, Profit*). Menurut Elkington (1997: 71), tantangan keberlanjutan yang dianggap oleh perusahaan-perusahaan hanya bagaimana membuat bisnis lebih efisien dan memangkas biaya melalui “penghijauan”. Namun sebetulnya gambaran besar dari tantangan keberlanjutan bukan hanya masalah ekonomi dan lingkungan, namun sebaliknya keberlanjutan mengangkat isu-isu sosial, etika bahkan politik. Masalah-masalah ini melebihi mandat dan kemampuan perusahaan. Namun di saat yang sama, perusahaan digambarkan sebagai organisasi dengan sumber daya, teknologi, jangkauan global, dan motivasi dalam mencapai keberlanjutan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Standar Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report Guidelines*)

- a. Standar GRI (*Global Reporting Initiative*)

Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menetapkan tujuan aspirasional pembangunan keberlanjutan, yang dideskripsikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri menurut *Global Sustainability Standards Board* (2016: 3). Maka organisasi perlu melakukan pelaporan keberlanjutan, yang adalah praktik pelaporan organisasi secara terbuka mengenai dampak lingkungan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

sosial dan ekonomi, serta kontribusi positif maupun negatif organisasi terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan.

Berikut prinsip-prinsip pelaporan menurut standar GRI 2016 dalam penentuan isi laporan:

(1) Inklusivitas Pemangku Kepentingan

Dalam pelaporannya, organisasi perlu melakukan identifikasi pemangku kepentingan dan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan dari pemangku kepentingan.

(2) Konteks Keberlanjutan

Dalam pelaporannya, organisasi perlu menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

(3) Materialitas

Dalam pelaporannya, organisasi perlu menyajikan laporan yang mencakup topik-topik terkait dampak lingkungan, sosial dan ekonomi atau yang memengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan.

(4) Kelengkapan

Dalam pelaporannya, organisasi perlu memberikan cakupan dari topik material serta batasan yang mencerminkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang signifikan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan untuk tahap-tahap pelibatan pemangku kepentingan, dipaparkan pada standar GRI G4 dan GRI 2016 sebagai berikut:

(1) G4-24 (GRI 102-40):

Organisasi harus mengungkapkan daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan.

(2) G4-25 (GRI 102-42):

Organisasi harus mengungkapkan dasar organisasi dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang dilibatkan.

(3) G4-26 (GRI 102-43):

Organisasi harus mengungkapkan pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan, frekuensi keterlibatan, dan indikasi apabila keterlibatan termasuk proses dari penyusunan laporan.

(4) G4-27 (GRI 102-44):

Organisasi harus mengungkapkan bagaimana topik utama dan isu utama melalui pelibatan pemangku kepentingan, bagaimana organisasi telah menanggapi topik tersebut melalui pelaporan.

Menurut GRI, proses menentukan aspek dan batasan material terdiri dari 4 tahap berikut:

(1) *Identification* (Identifikasi)

Organisasi mempertimbangkan daftar aspek GRI dan topik lainnya; menerapkan prinsip konteks keberlanjutan dan inklusivitas pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah berdasarkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang memiliki pengaruh; mengidentifikasi dimana dampak terjadi; dan mencantumkan aspek dan topik lain yang relevan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan diperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(2) *Prioritization* (Prioritas)

Organisasi menerapkan prinsip materialitas dan inklusivitas pemangku kepentingan; menilai aspek dan topik dengan relevansinya dengan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang signifikan, berpengaruh pada penilaian dan keputusan pemangku kepentingan; mengidentifikasi aspek berdasarkan penilaian tersebut; menentukan kriteria, serta tingkat cakupan, jumlah data dan penjelasan yang akan diungkapkan; membuat daftar aspek material beserta batasan dan tingkat cakupannya.

(3) *Validation* (Validasi)

Organisasi menerapkan prinsip kelengkapan dan inklusivitas pemangku kepentingan; menilai aspek material terhadap lingkup, batasan dan waktu untuk memastikan laporan memberikan gambaran wajar danimbang mengenai representasi dari dampak lingkungan, sosial dan ekonomi organisasi yang signifikan, dan memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja organisasi; menyetujui daftar aspek yang diidentifikasi dengan senior internal selaku pembuat keputusan; menyiapkan sistem dan proses untuk mengumpulkan informasi yang akan diungkapkan; menentukan informasi yang tersedia dan menjelaskannya.

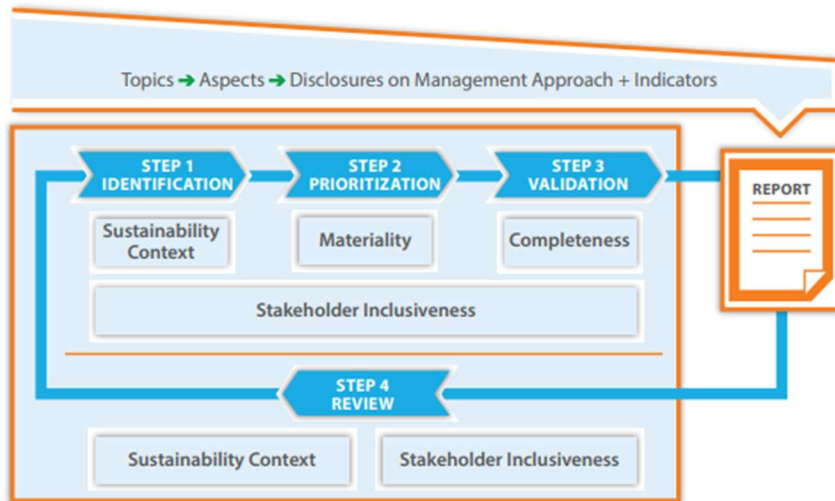
(4) *Review* (Meninjau)

Organisasi menerapkan prinsip konteks keberlanjutan dan inklusivitas pemangku kepentingan; meninjau aspek material dari periode pelaporan sebelumnya; menggunakan hasil tinjauan untuk

diinformasikan pada langkah identifikasi di periode pelaporan selanjutnya.

Gambar 2.3

Proses Penilaian Materialitas dan Batasannya



Sumber: GRI G4 (2013)

b. AccountAbility

AccountAbility adalah sebuah perusahaan konsultan dan standar keberlanjutan global yang bekerja sama dengan bisnis, pemerintah, dan organisasi multilateral untuk memajukan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan meningkatkan kinerja jangka panjang.

Standar AccountAbility terdiri dari:

(1) AA1000AP

Standar AA1000AP (2018) bertujuan menjabarkan prinsip-prinsip sebagai panduan internasional bagi organisasi. Panduan ini dapat digunakan untuk menguji, meningkatkan, dan mengkomunikasikan pertanggungjawaban dan kinerja keberlanjutan mereka. AA1000AP memberikan panduan mengenai bagaimana organisasi-organisasi

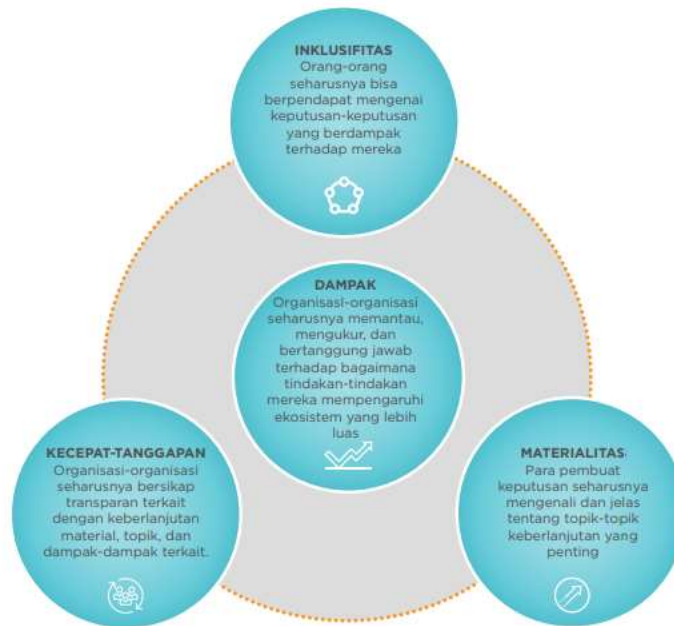


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bertanggungjawab terhadap usaha serta dampaknya terhadap ekosistem yang luas.

Terdapat 4 prinsip pada standar AccountAbility, yaitu inklusifitas, dampak, kecepat-tanggapan, dan materialitas. Penjelasan mengenai keempat prinsip ini dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
4 Prinsip AccountAbility



Sumber: AA1000AP (2018: 13)

(2) AA1000AS

AA1000AS (2020) adalah standar yang diakui secara internasional, independen di industri, dan tersedia secara bebas. Standar ini berisi persyaratan bagi penyedia asuransi berlisensi AccountAbility untuk menjalankan asuransi berkelanjutan yang berkualitas tinggi pada penerapan AA1000AP oleh organisasi pelapor. AA1000AS juga dapat digunakan oleh organisasi secara internal untuk penilaian mandiri, seperti menyiapkan asuransi eksternal, gratis, meskipun temuan penilaian mandiri tersebut tidak akan dipublikasikan diakui oleh AccountAbility.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



AA1000AS menjelaskan:

- (a) Bagaimana menentukan ruang lingkup dan prasyarat yang harus dipenuhi ketika menerima perikatan asurans dimana standar tersebut digunakan.
- (b) Bagaimana melakukan perikatan sesuai dengan standar.
- (c) Bagaimana menerbitkan Pernyataan Jaminan akhir dan Laporan opsional kepada Manajemen.

Jaminan keberlanjutan sesuai dengan AA1000AS v3 menilai dan memberikan kesimpulan tentang:

- (a) Sifat dan tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Akuntabilitas AA1000.
- (b) Jika didefinisikan dalam ruang lingkup perikatan, keandalan dan kualitas informasi yang diungkapkan atas kinerja keberlanjutan.

Gambar 2.5
Proses Asurans dengan AA1000AS



Sumber: AA1000AS (2020: 11)

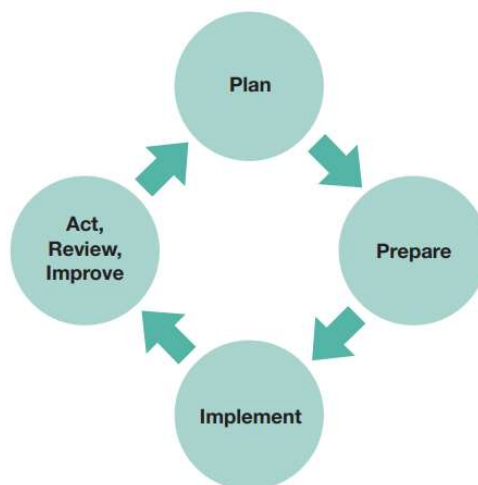
(3) AA1000SES

AA1000SES (2021) adalah standar keterlibatan pemangku kepentingan yang berlaku secara umum, kerangka kerja untuk desain,

implementasi, penilaian dan komunikasi kualitas keterlibatan pemangku kepentingan. Standar ini menjelaskan bagaimana membangun komitmen untuk keterlibatan pemangku kepentingan; bagaimana mengintegrasikan keterlibatan pemangku kepentingan dengan tata kelola, strategi, dan operasi; bagaimana menentukan tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan untuk pelibatan; serta proses yang akan memberikan praktik keterlibatan yang berkualitas dan inklusif, serta hasil yang bernilai.

AA1000SES berlaku untuk segala jenis dan tingkat keterlibatan pemangku kepentingan. Standar ini dapat digunakan untuk keterlibatan internal dan eksternal, untuk publik, swasta dan sipil organisasi masyarakat dari semua ukuran, serta kegiatan berbasis proyek serta untuk tujuan yang sedang berlangsung. AA1000SES dimaksudkan untuk digunakan oleh pemilik proses keterlibatan pemangku kepentingan. Standar ini juga akan berguna bagi manajer dan orang lain yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan, juga sebagai peserta dalam keterlibatan pemangku kepentingan.

Gambar 2.6
Proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam AA1000SES



Sumber: AA1000SES (2021)

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Proses keterlibatan pemangku kepentingan pada AA1000SES terdiri

dari 4 tahap, yaitu:

- (a) *Plan*
 - (i) Membuat profil dan memetakan pemangku kepentingan
 - (ii) Menentukan tingkat dan metode keterlibatan
 - (iii) Menetapkan dan mengomunikasikan batasan pengungkapan
 - (iv) Membuat *draft* rencana keterlibatan
 - (v) Menetapkan indikator
- (b) *Prepare*
 - (i) Memobilisasi sumber daya
 - (ii) Membangun kapasitas
 - (iii) Mengidentifikasi dan mempersiapkan risiko keterlibatan
- (c) *Implement the engagement plan*
 - (i) Mengundang pemangku kepentingan untuk terlibat
 - (ii) Mengarahkan pemangku kepentingan
 - (iii) Melibatkan
 - (iv) Mendokumentasikan keterlibatan dan hasil
 - (v) Mengembangkan *action plan*
 - (vi) Mengomunikasikan hasil keterlibatan dan *action plan*
- (d) *Act, Review, Improve*
 - (i) Memantau dan mengevaluasi keterlibatan
 - (ii) Mempelajari dan meningkatkan
 - (iii) Melakukan *follow up* pada *action plan*
 - (iv) Melaporkan keterlibatan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. SUSBA (*Sustainable Banking Assessment*)

SUSBA adalah alat penilaian yang menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun serta menyoroti kemajuan ataupun kemunduran kinerja bank pada integrasi aspek lingkungan dan sosial dalam strategi perusahaan serta proses pengambilan keputusan perusahaan. Alat ini digunakan untuk menilai pengungkapan publik dari 38 bank yang terdaftar di ASEAN, yaitu dari Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia.

Kerangka penilaian SUSBA terdiri dari 6 pilar dan 11 indikator yang dianggap WWF sebagai integrasi ESG (*Environmental, Social and Governance*) yang kuat. Penilaian dilakukan terhadap 70 sub-indikator yang terdapat pilihan jawaban “ya” dan “tidak”. SUSBA mengembangkan kerangka penilaiannya dengan mengacu pada beberapa hal berikut:

- (1) Kerangka kerja, standar dan inisiatif internasional yang telah ada, di antaranya pedoman GRI, kerangka kerja IIRC (*International Integrated Reporting Council*), rekomendasi TCFD SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*).
- (2) Prinsip dan pedoman nasional mengenai pelaporan keberlanjutan yang relevan.
- (3) Isu-isu lingkungan dan sosial khusus yang paling relevan dengan Asia Tenggara.
- (4) Wawasan berbasis sains mendalam yang berakar pada jaringan global ahli keberlanjutan WWF.

d. SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*)

SASB (*Sustainability Accounting Standards Board*) adalah sebuah organisasi non-profit yang menetapkan standar secara independen. Misi dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SASB adalah menciptakan serta mempertahankan standar spesifik masing-masing industri yang membantu perusahaan dalam pengungkapan yang bersifat material secara finansial serta informasi keberlanjutan yang berguna bagi pengambilan keputusan.

SASB mengacu pada keberlanjutan sebagai “ESG” (lingkungan, sosial, dan tata kelola), meskipun masalah tata kelola perusahaan tradisional seperti komposisi dewan tidak termasuk dalam lingkup kegiatan penetapan standar SASB. Standar SASB dirancang untuk mengidentifikasi serangkaian masalah keberlanjutan minimum yang paling mungkin berdampak pada operasi kinerja atau kondisi keuangan perusahaan pada umumnya dalam suatu industri, terlepas dari lokasinya. Standar SASB dirancang untuk memungkinkan komunikasi mengenai kinerja perusahaan tentang masalah keberlanjutan tingkat industri dengan biaya yang efektif dan cara yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan menggunakan mekanisme pengungkapan dan pelaporan yang ada. Bisnis dapat menggunakan standar SASB untuk mengidentifikasi, mengelola, dan berkomunikasi dengan lebih baik kepada investor tentang keberlanjutan informasi yang material secara finansial. Penggunaan standar dapat menguntungkan bisnis dengan meningkatkan transparansi, risiko manajemen, dan kinerja. Standar SASB dapat membantu investor dengan mendorong pelaporan yang sebanding, konsisten, dan material secara finansial, sehingga memungkinkan investor untuk membuat keputusan investasi dan pemungutan suara yang lebih baik.

SASB telah mengembangkan seperangkat standar akuntansi keberlanjutan bagi 77 industri. Setiap standar mendeskripsikan industri yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi subjek, serta asumsi mengenai model bisnis dominan dan segmen industri.

Standar SASB meliputi:

(1) *Disclosure Topics* (topik pengungkapan):

Satu set minimum topik pengungkapan khusus industri yang kemungkinan besar merupakan materi informasi, dan deskripsi singkat tentang bagaimana manajemen atau salah urus setiap topik dapat memengaruhi penciptaan nilai.

(2) *Accounting Metrics* (metrik akuntansi):

Serangkaian metrik akuntansi kuantitatif dan/ atau kualitatif yang dimaksudkan untuk mengukur kinerja pada setiap topik.

(3) *Technical Protocols* (protokol teknis):

Setiap metrik akuntansi disertai dengan protokol teknis yang memberikan panduan tentang definisi, ruang lingkup, implementasi, kompilasi, dan penyajian, yang kesemuanya dimaksudkan untuk membentuk kriteria yang sesuai untuk jaminan pihak ketiga.

(4) *Activity Metrics* (metrik aktivitas):

Seperangkat metrik yang mengukur skala bisnis perusahaan dan dimaksudkan untuk digunakan dalam hubungannya dengan metrik akuntansi untuk menormalkan data dan memfasilitasi perbandingan.

e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017

Otoritas Jasa Keuangan (2017) mengeluarkan peraturan POJK Nomor 51/ POJK.03/2017, yang memuat mengenai Laporan Keberlanjutan bagi entitas seperti lembaga keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Dalam

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan tersebut, OJK menyebutkan beberapa informasi yang harus dimuat dalam Laporan Keberlanjutan:

(1) Penjelasan Strategi Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan strategi keberlanjutan yang diterapkan.

(2) Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas membuat perbandingan dari kinerja entitas selama 3 tahun terakhir, dari segi ekonomi (kuantitas produk/ jasa, pendapatan, dsb.), segi lingkungan (penggunaan energi, pengurangan emisi, limbah dsb.) dan aspek sosial (dampak bagi masyarakat dan lingkungan).

(3) Profil Singkat

Pada bagian ini, entitas memberi gambaran mengenai karakteristik entitas, seperti visi, misi, alamat dan media untuk menghubungi entitas, serta skala usaha, produk/ jasa, dsb.

(4) Penjelasan Direksi

Pada bagian ini, entitas menjelaskan kebijakan yang dilakukan untuk memenuhi strategi keberlanjutan yang dicanangkan, penerapan yang telah dilakukan, serta strategi untuk mencapai target.

(5) Tata kelola keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan uraian tugas yang diemban oleh penanggung jawab keberlanjutan entitas, pengembangan kompetensi yang dilaksanakan, prosedur dalam menangani risiko penerapan keberlanjutan terkait segi lingkungan, ekonomi dan sosial, serta

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penjelasan pemangku kepentingan dan permasalahan maupun perkembangan yang dihadapi.

(6) Kinerja keberlanjutan

Pada bagian ini, entitas menjelaskan kegiatan yang dilakukan dalam membangun budaya keberlanjutan, perbandingan kinerja lingkungan, ekonomi dan sosial selama 3 tahun terakhir, serta tanggung jawab pengembangan produk/ jasa.

(7) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.

6. Materialitas (*Materiality*)

a. Pengertian Materialitas

Menurut Mooney (2008: 350), materialitas adalah karakteristik dari informasi akuntansi yang menitikberatkan pada seberapa penting informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Jika jumlah kesalahan atau yang tertinggal dari laporan cukup besar untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan, maka hal tersebut dianggap material.

Kemudian menurut Taubken dan Feld (2018: 1), materialitas dari topik keberlanjutan menjadi faktor penentu dalam menentukan sejauh mana perusahaan memperhatikan dirinya sendiri dengan masalah itu. Penilaian materialitas adalah alat standar yang digunakan untuk mengevaluasi hal ini. Selama penilaian tersebut, perusahaan tidak hanya memastikan relevansi topik keberlanjutan tertentu dari perspektif pemangku kepentingan, tetapi juga menilai dampak perusahaan sendiri sehubungan dengan topik tersebut.

Materialitas dalam pelaporan keuangan, menurut GRI (2016: 10) adalah ambang batas yang memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan, pada khususnya investor. Konsep ini menyangkut dua





dimensi, yaitu dimensi dampak yang lebih luas dan dimensi pemangku kepentingan. Dalam melaporkan keberlanjutan, materialitas juga dianggap sebagai prinsip yang menentukan topik relevan mana yang cukup penting sehingga perlu dilaporkan. Setiap topik memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda, dan laporan diharapkan dapat mencerminkan topik-topik yang bersifat prioritas atau tingkat kepentingannya tinggi.

Dalam melaporkan keberlanjutan, organisasi harus memuat topik-topik yang:

- (1) Mencerminkan dampak lingkungan sosial dan ekonomi secara signifikan; atau
- (2) Secara substansial memengaruhi penilaian dan keputusan dari pemangku kepentingan.

Menurut AccountAbility (2018: 20), materialitas berkaitan dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan topik-topik yang paling sesuai dengan topik-topik keberlanjutan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap organisasi dan pemangku kepentingannya. Topik material yaitu topik yang akan berpengaruh dan berdampak secara mendasar terhadap penilaian, keputusan, tindakan, dan kinerja sebuah organisasi dan pemangku kepentingannya dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

b. Melaporkan Topik Material

- (1) Informasi umum tentang proses menurut Pengungkapan GRI 102-46 dan 102-47

Dalam klausul 102-46, GRI membahas mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topik. Berikut adalah persyaratan pelaporan yang harus dilengkapi oleh organisasi pelapor:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(a) Penjelasan mengenai proses yang dilakukan untuk menentukan isi laporan dan batasan topik.

(b) Penjelasan mengenai cara mengimplementasikan prinsip-prinsip pelaporan dalam menentukan isi laporan.

Dalam menyusun informasi untuk pengungkapan klausul 102-46, organisasi harus menjelaskan juga bagaimana prinsip Materialitas diimplementasikan dalam mengidentifikasi topik material, termasuk asumsi yang dibuat.

Sedangkan dalam klausul 102-47, GRI membahas mengenai daftar topik material. Persyaratan pelaporan untuk klausul ini adalah organisasi pelapor harus melaporkan daftar topik material yang diidentifikasi dalam proses untuk menentukan isi laporan.

(2) Informasi spesifik tentang topik material menurut Pengungkapan GRI 103-1

Dalam klausul 103-1, GRI membahas mengenai menetapkan isi laporan dan batasan topik. Persyaratan pelaporan yang ditetapkan bagi organisasi pelapor:

(a) Penjelasan alasan suatu topik bersifat material.

(b) Batasan untuk topik material, yang mencakup:

i) lokasi terjadinya dampak;

ii) keterlibatan organisasi atas dampak, sebagai penyebab atau pemberi kontribusi.

(c) Pembatasan khusus terkait dengan batasan topik, jika melampaui organisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Pengujian Materialitas

Proses pengujian materialitas menurut AccountAbility (2018: 21) sebaiknya dilakukan secara teratur dan disesuaikan dengan proses-proses pengembangan strategi, pembuatan keputusan, pengelolaan resiko dan kepatuhan, pengelolaan operasional, dan pelaporan organisasi. Hal tersebut juga harus didokumentasikan dengan jelas dan jika sudah selesai, diberitahukan kepada para pemangku kepentingan. Suatu pengujian materialitas yang efektif memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada organisasi mengenai konteks keberlanjutannya, topik mana yang material atau yang tidak, dan kepada siapa topik ini material dan mengapa. Topik-topik material sebuah organisasi akan tumbuh dan berkembang seiring kematangan topik, fluktuasi penggerak, dan pemahaman yang meningkat berdasarkan masukan-masukan tambahan dari para pemangku kepentingan. Topik-topik material juga akan tumbuh berkembang jika dan ketika organisasi memasukkan rantai nilainya dalam pengelolaan kinerja berkelanjutan.

Sedangkan menurut GRI (2016: 10), dalam menentukan topik material, organisasi pelapor perlu memperhitungkan faktor-faktor berikut:

- (1) Dampak lingkungan, sosial dan ekonomi yang penting (contohnya perubahan iklim, HIV-AIDS, atau kemiskinan) yang telah diidentifikasi organisasi melalui investigasi yang kuat oleh ahli atau badan terkait.
- (2) Kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan internal, seperti karyawan dan pemegang saham;
- (3) Kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi yang lebih luas, serta topik-topik yang dikemukakan oleh para pemangku kepentingan eksternal.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Topik utama dan tantangan ke depannya untuk industri, sebagaimana diidentifikasi oleh rekan maupun pesaing.
- (5) Hukum, peraturan, perjanjian internasional, atau perjanjian sukarela tentang signifikansi strategis untuk organisasi dan pemangku kepentingan;
- (6) Nilai, kebijakan, strategi, sistem manajemen operasional, tujuan, dan sasaran organisasi yang utama;
- (7) Kompetensi inti dari organisasi dan cara mereka dapat berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan;
- (8) Konsekuensi bagi organisasi yang terkait dengan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan/atau masyarakat (misalnya, risiko untuk model bisnis atau reputasinya);
- (9) Topik material secara tepat diprioritaskan dalam laporan.

d. Kriteria Kepatuhan Materialitas AA1000AP

Tindakan-tindakan berikut ini dirancang untuk memandu organisasi-organisasi baik dalam menerapkan Prinsip Materialitas maupun memantau kemajuan mereka sendiri dalam penerapannya. Pemenuhan kriteria-kriteria ini menghasilkan kepatuhan terhadap Prinsip tersebut. Kriteria-kriteria ini juga digunakan oleh penyedia jasa *assurance* untuk menguji penegakan Prinsip oleh sebuah organisasi.

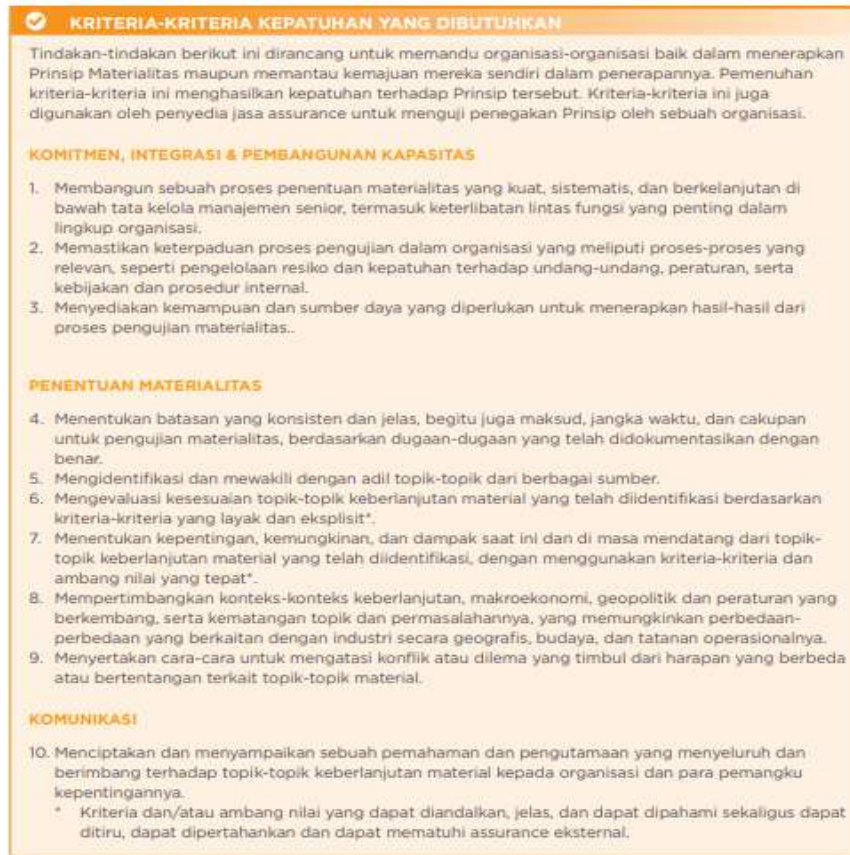
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.7
Kriteria Menerapkan Kepatuhan pada Prinsip Materialitas AA1000AP



Sumber: AA1000AP (2018)

e. Penentuan Materialitas

Proses penentuan materialitas menurut AccountAbility (2018: 21) seharusnya dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang menyeluruh dan berimbang dipertimbangkan dan dianalisa. Sebuah organisasi memerlukan masukan-masukan dari seluruh sumber-sumber dan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk sumber-sumber internal maupun eksternal, mencakup jangka waktu yang sesuai. Masukan-masukan seperti itu meliputi informasi yang luas melebihi informasi dan penggerak finansial, termasuk profil para pemangku kepentingan, permasalahan dan saran-saran pemangku kepentingan, norma-norma yang berbasis masyarakat dan rekan sejawat, konteks keberlanjutan, faktor-faktor makroekonomi dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

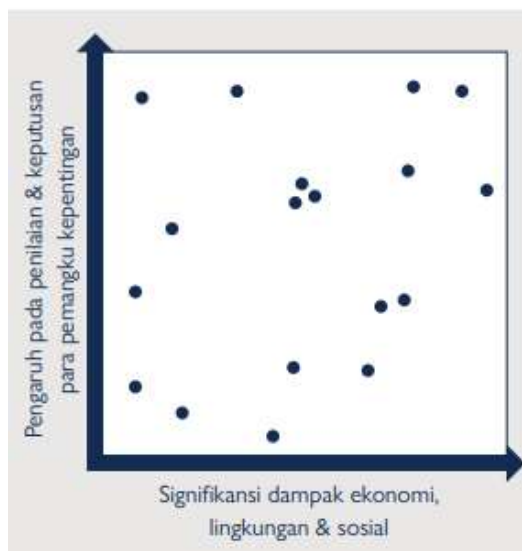
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

geopolitik, serta kebijakan, pelaporan dan kerangka kerja regulasi yang sesuai. Analisa terhadap informasi yang telah dikumpulkan itu perlu meliputi pertimbangan penggerak keberlanjutan, yang mungkin melibatkan dampak-dampak finansial, dan seharusnya menjelaskan kebutuhan, kepentingan, dan prioritas organisasi serta para pemangku kepentingannya. Organisasi harus bertanggung jawab penuh dalam menentukan, memahami, dan mengkomunikasikan topik-topik keberlanjutan materialnya.

Dalam GRI (2016: 11), representasi visual dari penentuan prioritas topik ditampilkan dengan matriks. Matriks tersebut menunjukkan cara dua dimensi (dampak yang lebih luas dan pemangku kepentingan) untuk menilai apakah suatu topik bersifat material; dan bahwa suatu topik dapat bersifat material hanya berdasarkan salah satu dimensi ini. Penggunaan matriks yang persis seperti ini tidak diwajibkan; namun, untuk menerapkan prinsip materialitas, diwajibkan untuk mengidentifikasi topik material berdasarkan pada dua dimensi ini.

Gambar 2.8
Matriks Penentuan Prioritas Topik Materialitas
 Representasi visual dari penentuan prioritas topik



Sumber: GRI (2016)

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Penelitian Terdahulu Kualitatif
 - a. Bertemakan materialitas

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditinjau secara kualitatif. Machado, Dias, dan Fonseca (2021) dalam “*Transparency of materiality analysis in GRI-based sustainability reports*” melakukan penelitian pada 140 laporan yang mewakili 38 negara untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang paling sering terlibat dan teknik keterlibatan masing-masing selama analisis materialitas; memahami sejauh mana organisasi pelapor GRI terkemuka mengungkapkan enam indikator terkait materialitas; dan menggali potensi pengaruh jaminan pihak ketiga, jenis standar GRI, dan kondisi ekonomi kantor pusat dalam transparansi. Hasil yang didapat yaitu identifikasi topik material dalam laporan keberlanjutan masih mengandung ketidakjelasan, keringkasan dan kesewenang-wenangan sehingga organisasi masih memiliki ruang yang besar untuk menyesuaikan materialitas dengan nilai dan prioritas politik dari perusahaan. Standar penentuan teknik dan pendekatan yang dilakukan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan juga masih perlu dikembangkan dalam konteks sektor-sektor tertentu. Sedangkan tingkat pendapatan perusahaan tidak mempengaruhi transparansi analisis materialitas.

Kemudian Beske, Haustein, dan Lorson (2020) dalam “*Materiality analysis in sustainability and integrated reports*” meneliti laporan keberlanjutan dari 33 perusahaan Jerman yang terdaftar pada indeks pasar uang HDAX. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaporan materialitas masih kurang detail dalam menjelaskan proses yang terjadi. Analisis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



materialitas memiliki kemungkinan untuk disalahgunakan perusahaan karena pelaporan dan proses yang kurang jelas. Perusahaan pelapor diharapkan dapat mempelajari metode dari perusahaan lain sehingga mampu mengidentifikasi pemangku kepentingan dan topik material dengan lebih baik lagi.

Sarraj (2018) dalam “*Examining Materiality in Sustainability Reporting: Evidence from GCC Countries*” meneliti proses penilaian materialitas oleh perusahaan GCC untuk mengetahui pengungkapan apa yang disediakan perusahaan GCC untuk analisis materialitasnya; bagaimana pengungkapan atas materialitas perusahaan berubah dari periode 2013 sampai dengan 2016; serta bagaimana proses analisis materialitas diadopsi oleh perusahaan untuk laporan keberlanjutan, jika dibandingkan dengan ketentuan dari GRI. Hasil penelitian mengungkapkan adanya perbedaan tingkat pengungkapan proses analisis materialitas. Meskipun dengan digunakannya pedoman GRI G4, perusahaan-perusahaan sampel mengalami peningkatan, sekitar setengah dari sampel tidak mengungkapkan informasi apapun dalam laporannya. Sampel yang tidak melakukan pengungkapan akan sulit dipahami oleh pemangku kepentingan dan transparansi berkurang karena menghilangkan isu yang material.

Guix, Font, dan Bonilla-Priego (2019) dalam “*Materiality: stakeholder accountability choices in hotels’ sustainability reports*” melakukan penelitian melalui wawancara dengan 8 manajer keberlanjutan dari grup-grup hotel terbesar di dunia untuk mengetahui konsep materialitas serta penerapan dan hambatan yang terjadi dalam industri perhotelan. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa para manajer yang menjadi narasumber cenderung mengelak ketika diwawancarai untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengungkapkan kriteria materialitas serta proses pengambilan keputusan dan bagaimana mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan. Mereka cenderung membatasi diri dalam mengungkap proses pelaporan keberlanjutan. Para ahli mengkonfirmasi bahwa sektor perhotelan tidak sistematis dan belum memiliki kejelasan dalam proses pengambilan keputusan dan mengontrol penilaian materialitas perusahaan.

Aryal (2017) dalam “*Materiality Assessment in Sustainability Reporting: Case Study of The Airline Industry*” meneliti 15 laporan keberlanjutan dari industri penerbangan untuk mengetahui bagaimana materialitas didefinisikan dalam laporan; peran pemangku kepentingan dipertimbangkan; serta isu material utama. Hasil menunjukkan terdapat pola yang berbeda-beda pada analisis materialitas sampel yang terpilih. Sektor penerbangan dalam analisis materialitasnya masih kurang transparan. Sebagian besar laporan keberlanjutan gagal mendefinisikan materialitas dan alasan dilakukannya analisis. Laporan-laporan didasarkan pada pedoman yang sama dan operasi bisnis yang dilakukan serupa, namun terdapat perbedaan dalam proses serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam analisis materialitas. Namun beberapa perusahaan memiliki hal-hal yang sekiranya dapat dipelajari oleh perusahaan lain untuk perbaikan.

Ribera (2017) meneliti 6 grup terbesar dari perusahaan-perusahaan Spanyol dalam “*Materiality in sustainability reporting: multiple standards and looking for common principles and measurement. The case of the seven biggest groups in Spain*” untuk mengetahui isu lingkungan, sosial, dan tata kelola yang memengaruhi performa kompetitif. Hasil penelitian yaitu perusahaan mengungkapkan detail mengenai pemangku kepentingan lebih

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



banyak dibandingkan proses yang dilakukan perusahaan. Hasil dari penentuan materialitas menjadi pedoman bagi strategi keberlanjutan perusahaan. Minoritas dari sampel mengatakan bahwa analisis materialitas memiliki dampak dan pengaruh pada strategi bisnis perusahaan. Tantangan perusahaan dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan adalah topik belum dipahami dengan baik dan jumlah topik yang dapat dipilih terlalu banyak. Manajer membutuhkan metode kuantitatif untuk dapat menilai keberlanjutan dengan baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi bisnis perusahaan.

Formisano, Fedele, dan Calabrese (2017) dalam “*Materiality matrix: a comparison between relevant indicators for banks and stakeholder*” meneliti laporan yang dipublikasi oleh 56 bank Italia pada *website* masing-masing, untuk menganalisis elemen yang diidentifikasi strategis untuk meningkatkan reputasi dan selaras dengan harapan pemangku kepentingan. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan industri perbankan memiliki berbagai teknik dalam penentuan matriks materialis yang mampu memperkaya laporan dengan komunikasi, serta menciptakan nilai waktu ke waktu dengan mengikuti proses yang ditentukan mulai dari identifikasi pemangku kepentingan hingga informasi yang relevan dalam menyusun strategi dan tujuan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam tahap pengembangan selanjutnya.

b. Bertemakan selain materialitas

Hörisch (2021) meneliti 17 tujuan pembangunan keberlanjutan (SDGs) dari *United Nations* yang disebut juga dengan SDGs, untuk membahas mengenai hubungan pandemi COVID-19 terhadap pembangunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keberlanjutan khususnya SDGs. Hasil yang didapat yaitu krisis COVID-19 tidak hanya berkaitan dengan SDGs tetapi merupakan bagian dari pengembangan penelitian itu sendiri. Pandemi telah terbukti sangat mengancam pencapaian SGD, sementara peluang terkait SDG tertentu juga dapat ditemukan.

Kumar dan Prakash (2019) meneliti bank publik dan bank swasta yang beroperasi di India, untuk meneliti kecenderungan pelaporan keberlanjutan dari bank sektor publik dan swasta di India dengan hubungannya dengan indikator yang diberikan dalam dua kerangka pengungkapan keberlanjutan yaitu pedoman GRI G4 dan NVG. Hasil yang didapat yaitu Bank-bank di India jauh lebih lambat dalam mengadopsi praktik pelaporan keberlanjutan. Masalah keberlanjutan yang merupakan prioritas tertinggi bagi bank secara langsung terkait dengan operasi bisnis mereka seperti inklusi keuangan, literasi keuangan, teknologi hemat energi, dll. Indikator pertimbangan lingkungan relatif tidak ditangani oleh sebagian besar bank di India. Ada juga perbedaan yang signifikan dalam pengungkapan indikator sosial-lingkungan internal dan lingkungan antara bank-bank sektor publik dan swasta di India.

Asdiou dan Mokhtari (2019) meneliti perusahaan dari berbagai sektor yang terlibat dalam pendekatan CSR pada level eksternal, dan wawancara dengan manajer keberlanjutan tiap perusahaan pada level internal. Penelitian ini bertujuan untuk mengajukan suatu explanatory model yang mengidentifikasi faktor-faktor penentu indikator CSR dan menemukan motivasi nyata perusahaan untuk menggunakannya: untuk efisiensi atau perhatian terhadap legitimasi terhadap pemangku kepentingan. Hasil

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menunjukkan penggunaan indikator CSR dalam terang dua teori yang berbeda kerangka kerja: kontingen dan neo-institusional. Untuk teori kontingen, penggunaan CSR indikator memungkinkan perusahaan untuk mencari efisiensi maksimal, dan untuk menguji kinerja global. CSR indikator dapat mendorong organisasi ke arah keberlanjutan. Adapun teori neo-institusional, penggunaan indikator CSR memungkinkan perusahaan untuk mencari legitimasi yang lebih terhadap para pemangku kepentingan.

Doni et al. (2019) meneliti manajer, laporan serta dokumentasi lain dari DBS untuk menyelidiki keterlibatan dengan pelaporan terintegrasi (IR) DBS, sebagai salah satu bank yang memelopori IR. Industri perbankan anggota menghadapi isu-isu spesifik sektor kritis mengenai penggunaan modal, terutama pengungkapan informasi terkait modal relasional dan alam, dan pelaporan hasil modal. Pelajaran ini mengkaji sebuah inovasi pendekatan akuntansi untuk beberapa modal yang diadopsi oleh DBS selama perjalanannya menuju IR. Peneliti menemukan bahwa DBS mengkonseptualisasi ulang, mengkategorikan ulang, dan mengukur banyak modal sebagai bentuk nilai non-keuangan menggunakan pendekatan neraca untuk membuat terlihat interaksi dan potensi ketegangan (pertukaran) di antara modal.

Kumar dan Prakash (2019) meneliti praktik laporan keberlanjutan dari 10 bank India terbaik untuk meneliti secara kritis pelaporan keberlanjutan masing-masing bank. Hasil yang didapat yaitu sebagian besar dari 10 bank India teratas belum mengadopsi praktik pengungkapan dan transparansi yang memadai dalam pelaporan keberlanjutan. Kemudian, meskipun Lingkungan dan Sosial tujuan dilaporkan secara luas, ada kelalaian

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

mencolok pada metrik seperti 'remunerasi yang setara', 'pekerjaan kesehatan dan keselamatan' dan 'privasi pelanggan'. Fokus keterlibatan pemangku kepentingan lemah seperti yang tercermin dalam rendahnya daya tarik persuasif konten SR sebagian besar bank.

Penelitian Terdahulu Kuantitatif

a. CSR sebagai variabel dependen

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang ditinjau secara kualitatif dengan CSR sebagai variabel dependen. Doni, Corvino, dan Bianchi Martini (2021) meneliti 42 perusahaan besar industri minyak dan gas yang terdaftar di Eropa, untuk mengetahui apakah dan sejauh mana, model tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dikaitkan dengan kinerja sosial. Model penelitian yang digunakan yaitu model fixed effects regression. Variabel independen terdiri dari Komite CSR, Pelaporan Keberlanjutan CSR, Pelaporan Departemen Audit Internal, ROA Nilai buku per saham, *Gearing Ratio*, Keterlibatan pemangku kepentingan, Kinerja ekonomi negara. Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah Performa CSR (Social Score), dan variabel moderating yang digunakan adalah Komite CSR. Hasil yang diperoleh yaitu keterlibatan pemangku kepentingan secara positif terkait dengan kinerja sosial perusahaan dan dapat dianggap sebagai pendorong internal penting yang mampu membentuk budaya perusahaan dan kemungkinan besar untuk mengatasi masalah tanggung jawab sosial perusahaan.

Kemudian Rashid (2021) meneliti sebanyak 115 badan usaha nonfinansial yang terdaftar pada *Dhaka Stock Exchange* untuk periode 2001 sampai dengan 2010. penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh kepemilikan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



saham institusional pada praktik tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan di Bangladesh. Model yang digunakan yaitu model regresi pada beberapa variabel independen: Kepemilikan saham orang dalam; rasio utang; likuiditas; usia perusahaan; ukuran perusahaan; pertumbuhan perusahaan; profitabilitas; risiko perusahaan (persamaan CSR); kepemilikan saham eksternal dan kapitalisasi pasar (kelembagaan persamaan kepemilikan saham) serta variabel dependen: Kepemilikan saham institusional dan CSR. Hasil yang didapat yaitu baik pelaporan CSR dan kepemilikan saham institusional saling mempengaruhi secara negatif.

Amidjaya dan Widagdo (2020) meneliti 31 bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, Meneliti 31 bank yang terdaftar pada BEI, untuk menemukan bukti empiris pengaruh struktur kepemilikan dan corporate governance terhadap sustainability reporting pada bank-bank yang terdaftar di Indonesia, serta mendeskripsikan praktik pengungkapan pelaporan keberlanjutan. Model yang digunakan adalah panel data regression analysis pada variabel independen: Indeks tata kelola perusahaan; kepemilikan asing; kepemilikan keluarga; indeks perbankan digital; peraturan keuangan berkelanjutan OJK, lalu variabel dependen yang digunakan adalah pelaporan keberlanjutan, serta variabel interaksi: Kepemilikan asing pada CG; kepemilikan keluarga pada CG dan variabel kontrol: kepemilikan pemerintah; ukuran bank; profitabilitas; risiko likuiditas. Hasil penelitian menunjukkan bukti empiris bahwa *sustainability reporting* pada bank-bank yang terdaftar di Indonesia masih rendah. CG, kepemilikan asing melemahkan efek CG sedangkan kepemilikan asing tidak memiliki peran moderasi yang signifikan. Perbankan digital bukanlah penentu yang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

signifikan dan *roadmap* keuangan berkelanjutan OJK terbukti tidak mempengaruhi niat bank untuk menghasilkan laporan keberlanjutan.

Buallay dan Al-Ajmi (2020) meneliti 59 bank yang terdaftar pada GCC *Stock Exchange* untuk menganalisis sejauh mana pelaporan keberlanjutan oleh bank di GCC dipengaruhi oleh atribut komite audit. Model penelitian yang digunakan yaitu model regresi linier pada variabel independen: Atribut komite audit (keahlian keuangan, ukuran, anggota independen, frekuensi pertemuan), variabel dependen: skor ESG, dan variabel kontrol: ukuran bank; umur bank; dan kualitas audit. Hasil penelitian yaitu berbeda dengan hipotesis, penulis melaporkan kembali hubungan negatif antara keahlian keuangan dan pelaporan keberlanjutan. Independensi anggota dan frekuensi pertemuan memainkan peran positif dalam menentukan tingkat pengungkapan.

b. CSR sebagai variabel independen

Rossi et al. (2021) meneliti 83 dari 100 perusahaan terbaik dari *Corporate Knights* dalam perilaku etis yang memenuhi kriteria sampling. Penelitian bertujuan meneliti efek potensial yang dapat diberikan oleh etika bisnis secara umum dan tanggung jawab sosial perusahaan pada pengungkapan sukarela modal intelektual untuk perusahaan yang paling terlibat secara etis di dunia. Model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda, pada variabel independen: : Etika Bisnis; Indeks CSR, kemudian variabel dependen: Pengungkapan sukarela modal intelektual dan variabel kontrol: Intensitas inovasi; tarif pajak efektif; persentase perempuan di dewan direksi; tingkat *leverage*, sektor pencemar; tingkat etika negara; dan sistem hukum. Hasil menunjukkan adopsi pendekatan etis dan tanggung

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



jawab sosial secara positif terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela tentang modal intelektual.

Rezaee et al. (2020) 127 badan usaha yang terdaftar pada TSE dari industri manufaktur, pelayanan, transportasi, dan pertambangan. Penelitian bertujuan mengetahui hubungan antara kualitas pengungkapan lingkungan (EDQ) dan risiko dan untuk memeriksa lebih lanjut apakah praktik tata kelola perusahaan (CG) memoderasi hubungan ini. Model yang digunakan adalah model regresi pada variabel independen: kualitas pengungkapan lingkungan (EDQ), variabel dependen: risiko perusahaan, serta variabel kontrol: kinerja (ROA); ukuran perusahaan (SIZE); *leverage* (LEV); peluang pertumbuhan (GROWTH_OPP); usia perusahaan (FAGE); pertumbuhan penjualan (SAGR); kepemilikan institusional (INOW). Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif antara EDQ dan risiko perusahaan diindikasikan. Sementara independensi dewan memoderasi hubungan ini, praktik CG lainnya seperti dualitas CEO dan ukuran dewan tidak menunjukkan efek apa pun pada hubungan antara EDQ dan risiko/Hasilnya tetap kuat setelah melakukan tes sensitivitas dan di bawah berbagai spesifikasi, termasuk data panel efek tetap dan regresi dua tahap Heckman.

Ho, Liang, dan Tumurbaatar (2019) meneliti 12 bank Mongolia, termasuk 65 laporan tahunan periode 2003 sampai dengan 2012, untuk mengetahui dampak tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada kinerja keuangan perusahaan (CFP) di bank-bank Mongolia. Model penelitian yang digunakan adalah model regresi pada variabel independen CSR (Pengungkapan CSR), serta variabel dependen: CFP (*Corporate Financial Performance*) meliputi ROA, ROE, NIM, NPL dan variabel kontrol: ukuran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan; struktur dewan; rasio likuiditas; rasio utang; pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan Bank dengan ukuran lebih besar atau dengan dualitas *Chief Executive Officer* menunjukkan kinerja CSR yang lebih tinggi, Terlebih lagi, bank dengan kinerja CSR yang lebih tinggi cenderung memiliki margin bunga bersih yang lebih tinggi dan kredit bermasalah yang lebih rendah. Selanjutnya hubungan CSR-CFP bervariasi sebelum dan sesudah krisis keuangan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kerangka Pemikiran

Definisi materialitas dalam laporan keberlanjutan

Dalam menyusun laporan keberlanjutan, tiap emiten perlu menentukan topik atau masalah yang material bagi emiten. Sebelum menentukan topik material, tentunya emiten perlu terlebih dahulu mengetahui definisi materialitas bagi emiten. Dengan mengetahui definisi materialitas, proses penyusunan masalah material akan menjadi lebih mudah dan terarah, serta memberikan nilai lebih bagi emiten. Definisi yang tepat dan jelas akan menjadi dasar bagi emiten dalam menentukan prioritas masalah material. Menurut Taubken dan Feld (2018: 1), materialitas dari topik keberlanjutan menjadi faktor penentu dalam menentukan sejauh mana emiten memperhatikan dirinya sendiri dengan masalah itu. Penilaian materialitas adalah alat standar yang digunakan untuk mengevaluasi hal ini. Diharapkan dalam mendefinisikan materialitas, emiten memenuhi prinsip materialitas, sebagaimana telah ditetapkan oleh GRI dan AccountAbility (AA1000AP).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Maka melalui penelitian ini peneliti bermaksud mengetahui bagaimana tiap emiten yang menjadi objek penelitian mendefinisikan materialitas dalam laporan keberlanjutan.

Peran pemangku kepentingan dalam industri perbankan

Menurut GRI (2016), dalam penilaian materialitas suatu topik atau masalah, emiten akan turut mempertimbangkan berbagai kekhawatiran yang diungkapkan oleh para pemangku kepentingan secara langsung. Ketika menyusun isi laporan keberlanjutan, emiten juga meninjau harapan wajar dan kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam menentukan masalah material, emiten perlu memerhatikan faktor kepentingan dan harapan para pemangku kepentingan internal (terlibat langsung dalam organisasi) maupun eksternal (tidak terlibat secara langsung dalam organisasi). Diharapkan dalam penilaian materialitas, terdapat pelibatan yang sejalan dengan prinsip inklusivitas pemangku kepentingan, sebagaimana telah ditetapkan oleh GRI.

Maka melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mengetahui bagaimana tiap emiten yang menjadi objek penelitian mempertimbangkan pemangku kepentingan dalam penilaian materialitas untuk laporan keberlanjutan, khususnya pada industri perbankan yang banyak terlibat dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

Masalah material utama yang diidentifikasi

Setiap emiten memiliki kegiatan dan dampak yang berbeda-beda, khususnya perbedaan ini semakin jelas jika dibandingkan antar industri. Industri perbankan menjadi salah satu industri yang banyak terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, dimana setiap entitas semakin butuh dan beradaptasi dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

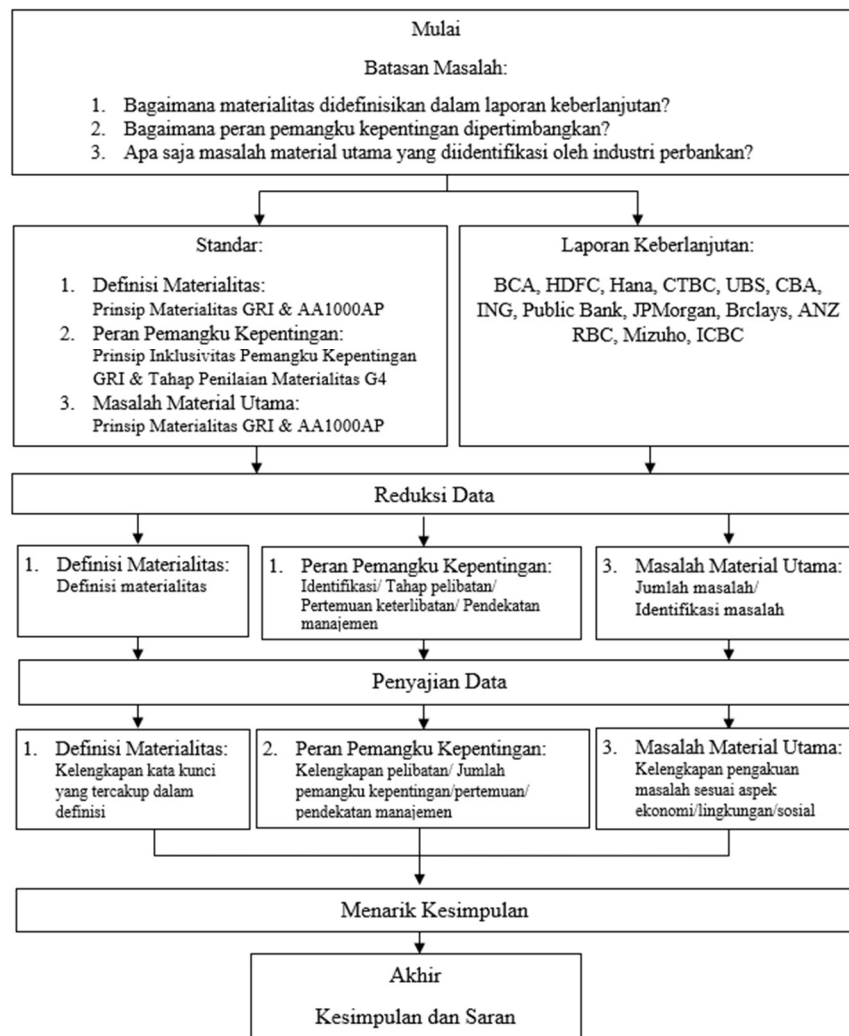


fenomena *banking from home*, *cashless transaction*, dan sebagainya; sehingga keberadaan industri perbankan semakin penting. Diharapkan dalam identifikasi masalah material utama, emiten memenuhi prinsip materialitas, sebagaimana telah ditetapkan oleh GRI dan AccountAbility (AA1000AP).

Maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini, apa saja yang menjadi masalah material utama yang diidentifikasi oleh emiten pada industri perbankan yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan uraian pemikiran tersebut, peneliti membentuk kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2.9
Kerangka Pemikiran Analisis Penilaian Materialitas



Sumber: data diolah kembali

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.